



## Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: *e-Budgeting* untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Atik Andhayani

Politeknik Negeri Malang, Jl Soekarno Hatta No. 9 Malang 65144

atikassa75@gmail.com

doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005

### Informasi Artikel

Tanggal masuk	24-08-2019
Tanggal revisi	06-09-2019
Tanggal diterima	26-11-2019

### Keywords:

*Good Governance*  
*e-Budgeting*  
*Accountability*

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze e-budgeting process as an initial basis for the implementation of regional finances that is expected to narrow the opportunity to abuse the authority of officials and implementers of regional financial budgets. The research method was carried out with a case study in the Batu City Government in the year before and after the implementation of e-budgeting. The results indicates that prior the implementation of e-budgeting many errors occur in manual budget entry and after the implementation of e-budgeting proves that the implementation of e-budgeting has undergone several changes and progress but is urgently needed human resources in handling e-budgeting, support from officials, and coordination of all parties.*

### Kata kunci:

*Good Governance*  
*e-Budgeting*  
*Akuntabilitas*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa e-budgeting dalam proses anggaran sebagai dasar awal terlaksananya keuangan daerah yang diharapkan dapat mempersempit peluang penyalahgunaan wewenang pejabat dan pelaksana anggaran keuangan daerah. Metode penelitian dilakukan dengan studi kasus di Pemerintah Kota Batu pada tahun sebelum dan setelah terlaksananya *e-budgeting*. Hasil dari penelitian ini sebelum dilaksanakan *e-budgeting* banyak terjadi kesalahan entry manual anggaran dan setelah dilaksanakan *e-budgeting* membuktikan bahwa pelaksanaan *e-budgeting* telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan tetapi sangat dibutuhkan sumber daya manusia dalam menangani *e-budgeting*, dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak.



## 1. Pendahuluan

Pemerintah daerah di Indonesia sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 menandai implementasi otonomi daerah. Perubahan peraturan yang terjadi membawa

dampak kepada otonomi penatausahaan keuangan daerah. Akuntabilitas pemerintah daerah dituntut untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah. Good governance mencerminkan

pertanggungjawaban pemerintah daerah dengan seiring pesatnya teknologi informasi saat ini, maka harus ditunjang e-Government. Pemerintah daerah saat ini didorong untuk melaksanakan *e-Government* yang di dalamnya termasuk *e-Data*, *e-Planning*, *e-Budgeting* dan *e-Reporting*.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang menggunakan e-government sebagai alat untuk melawan korupsi, dalam pelaksanaannya masih banyak membutuhkan perbaikan dalam penerapan seperti peraturan-perundangan; kebijakan, sarana prasarana, sumber daya manusia, tata laksana pendukung [1]. *E-government* adalah fenomena yang kompleks dan merupakan persimpangan berbagai dimensi seperti e-informasi, e-transaksi, dan e-partisipasi. Konsep dan praktik e-government didefinisikan dengan berbagai istilah seperti pemerintahan digital, pemerintahan online, dan saat ini dengan teknologi canggih seperti pemerintahan seluler, pemerintahan yang ada di mana-mana, dan pemerintahan cerdas [2]. Menurut [3] sistem e-Government Indonesia belum setara dengan negara di tingkat Asia, seperti Singapura, Jepang dan Israel dengan nilai EGDI mulai dari 0,75 - 1,00 (high-EDGI). Posisi Indeks Pembangunan e-Government Indonesia (EGDI) berkisar antara 0,25-0,50 (EGDI menengah). Sebagai ukuran untuk Indonesia bahwa e-Government telah berkembang pesat selama 15 tahun terakhir di dunia, United Nation Development Programme (UNDP) mengukur Indeks Pembangunan e-Government (EGDI) mulai dari 0,25 hingga 1,00.

Cita-cita pemerintah dalam penerapan e-Budgeting adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan menutup celah korupsi dan pemborosan anggaran. Komitmen pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk mengimplementasikan e-Budgeting. Selain pemerintah daerah, hal lain yang juga menjadi kendala penerapan e-Budgeting adalah terkait dengan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia saat ini

sedang berupaya memperbaiki keuangan daerah dalam hal transparansi yang berhubungan dengan proses, lembaga, dan informasi yang dapat diakses langsung oleh public atau pihak terkait. Pemerintah juga bercita-cita menjadi lebih responsif yang berarti proses melayani lebih baik dari pemangku kepentingan yang terkait. Tata pemerintahan yang baik yang berorientasi menciptakan konsensus luas melalui mediasi di antara para pemangku kepentingan yang berbeda, kesetaraan antara pria dan wanita memiliki peluang untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Efektivitas dan efisiensi - proses dan lembaga memberikan hasil yang memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya. Akuntabilitas - pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik, serta kepada pemangku kepentingan institusional. Visi strategis *good governance* pada *United Nation Development Program*: “Para pemimpin dan publik memiliki cara pandang jangka panjang dan luas tentang tata pemerintahan yang baik, pembangunan manusia, dan hal yang dibutuhkan untuk pembangunan. Cara pandang harus dipahami tentang kompleksitas historis, budaya, social, karakteristik saling terkait ini saling menguatkan dan tidak bisa berdiri sendiri [4]

Permasalahan akuntabilitas tentang anggaran pemerintah daerah yang sering membawa ke ranah hukum, hal ini tidak terhindarkan karena sering terjadi penyalahgunaan rencana anggaran dari awal pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai mejadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik perencanaan di Organisasi Perangkat Daerah sampai pengesahan ke tingkat Dewan Perwakilan Rakyat. Implementasi e-Budgeting pada keuangan pemerintah daerah positif dan signifikan atas transparansi sehingga implementasi e-Budgeting berkualitas akan mempunyai efek tingkat

transparansi keuangan daerah yang tinggi juga [5].

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan e-Budgeting pemerintah daerah Indonesia, sebelum dan sesudah penerapan khususnya di Pemerintah Kota Batu sejak diberlakukannya pada tahun 2017-2019.

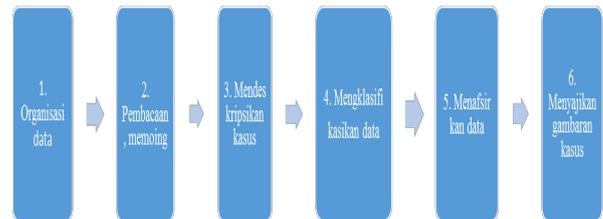
## 2. Metode

Metode penelitian kualitatif studi kasus dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang langsung berkenaan dengan pelaku yang terlibat pada proses e-Budgeting. [6] Menyatakan suatu penelitian atau pengkajian kembali diperlukan karena untuk mempelajari permasalahan kelompok tertentu, mengidentifikasi penyebab atau untuk mempelajari keadaan yang belum jelas. Penelitian kualitatif digunakan untuk menindaklanjuti tentang berbagai macam penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif sebelumnya. Studi kasus merupakan suatu pendekatan ahli pikir untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Penelitian ini mendeskripsikan studi kasus dalam menganalisis keseluruhan kasus terhadap masalah pelaksanaan e-Budgeting. Tujuan penelitian adalah untuk memahami permasalahan pelaksanaan e-Budgeting menjadi suatu kesimpulan jawaban.

Pengumpulan data dalam studi kasus adalah dengan pengamatan yaitu mengumpulkan catatan lapangan dengan melakukan penelitian atau pengkajian sebagai seorang pengamat; melakukan wawancara dan pengamatan juga dokumen dari Pemerintah Kota Batu berupa dokumen arsip resmi data untuk menganalisis dan mengungkap secara terperinci tentang studi kasus e-Budgeting dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang disampaikan oleh [6]. Teknik mengumpulkan data penelitian dilakukan melalui beberapa cara yaitu *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dan laporan atau dokumen Hasil penelitian sebagai dampak dari teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data,

hasil kelengkapan dalam penelitian berhubungan dengan ketepatan dan keberadaan kelengkapan data serta kualitas dalam proses dalam mengumpulkan data tersebut [7].

**Gambar 1. Analisis dan Penyajian Data**



Sumber: diolah dari Creswell, 2017

Teknik analisis serta penyajian data penelitian ini pada Gambar 1. Pada tahap pertama, organisasi data dilakukan dengan menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data yang dibutuhkan. Tahap kedua, dilakukan pembacaan, memoing yaitu membaca dan mencatat mengenai kasus yang terjadi ditranskripkan ke dalam transkrip atau tulisan. Tahap ketiga, peneliti mendeskripsikan kasus dan konteks. Tahap keempat, dilakukan klasifikasi data dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahap kelima, peneliti menafsirkan data dengan penafsiran langsung. Tahap keenam sebagai tahap terakhir, peneliti menyajikan (visualisasi) data dengan menyajikan gambaran mendalam dengan narasi atau table dan gambar tentang esensi kasus dalam bentuk pembahasan.

Pengujian data melalui triangulasi sehingga dianggap sah jika melalui crosscheck dengan membandingkan kepada beberapa sumber, waktu dan teknik sehingga menghasilkan data yang meyakinkan. Triangulasi dengan cara mengcrosscek data dari beberapa sumber berbeda yaitu dari beberapa operator e-Budgeting, kasi penyusunan dan sungram OPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD), Kepala OPD, Kasi Bappelitbangda dan Kepala Bidang Bappelitbangda. Triangulasi tersebut dengan cara berbeda kepada

narasumber, juga observasi dan dilakukan dokumentasi. Triangulasi waktu mempengaruhi kredibilitas data, sehingga dilakukan dengan mengumpulkan data dari narasumber dalam waktu dan situasi berbeda.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Good Governance

Tata laksana pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance* adalah suatu konsep tata kelola organisasi yang diterapkan secara baik dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi [5]. Karakteristik *governance* menurut UNDP, yaitu legitimasi politik; kerjasama dengan institusi masyarakat sipil; kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi; akuntabilitas birokratis dan keuangan (*financial*); manajemen sektor publik yang efisien; kebebasan informasi dan ekspresi; sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator *good governance* seperti: transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan. Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya *consensus* umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*.

Good governance mempunyai delapan karakteristik utama yaitu 1) *participation*, adanya partisipasi dalam berekspresi dan mengawasi anggaran dari semua pihak termasuk masyarakat luas; 2) *rule of law*, memiliki hubungan dengan aturan dan pelaksanaan ditetapkannya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara; 3) *transparency*, berfungsi dan bertanggungjawab dalam proses perencanaan, kebijakan, pencatatan, audit juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan; 4) *responsiveness* harus mampu menampung aspirasi public dalam jangka waktu tertentu; 5) *consensus orientation* harus dapat mengakomodir semua kepentingan public dalam tujuan pembangunan jangka panjang atau dikenal anggaran partisipatif; 6) *equity and inclusiveness* bahwa public ikut serta dan membuat keputusan keuangan yang tidak dibuat untuk golongan atau pemerintah saja; 7) *effectiveness and efficiency* yang menyatakan bahwa keputusan anggaran harus mencerminkan efektifitas dan efisiensi; 8) *accountability* bahwa anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan [8].

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah merancang program aplikasi penganggaran berbasis digital berupa e-budgeting yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sehingga prinsip tata kelola keuangan yang baik dapat diterapkan dan berdampak kepada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penerapan prinsip *good governance*, khususnya pada pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi dan mempersiapkan aparatnya menghadapi reformasi tata kelola keuangan daerah. Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Implementasi e-budgeting ini akan semakin berjalan dengan efektif, sehingga diharapkan pemerintah akan memperoleh manfaat, yang antara lain proses transaksi dan penyajian laporan lebih cepat.

#### E-Budgeting

Pengertian *Budgeting*, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai

penganggaran, adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan, dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter, serta berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. *Budgeting* jika diumpamakan seperti orang yang akan membuat kue, kita akan menuliskan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kue, yang tidak tertera dalam daftar tidak perlu dibeli.

*Public budgeting* menurut [9] suatu proses dalam penyusunan rencana kegiatan khususnya keuangan lalu dialokasikan sesuai fungsi dan sasaran kegiatan, yang dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Ada tujuh fungsi anggaran sektor publik menurut [9] 1) anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*), anggaran sebagai alat perencanaan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, merencanakan apa yang dilakukan, jumlah biaya yang diperlukan, dan hasil yang akan diperoleh; 2) anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*), anggaran memuat rencana rinci berupa pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan; 3) anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*), anggaran dipakai untuk menstabilkan ekonomi juga mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat; 4) anggaran sebagai alat politik (*political tool*), penyusunan anggaran dibutuhkan kemampuan manajemen keuangan public serta kemampuan dalam bernegosiasi dari manager public; 5) anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*), anggaran alat koorodinasi antara bagian di pemerintahan juga berfungsi sebagai alat komunikasi anatar unit kerja di lingkungan eksekutif yang kemudian dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi; 6) anggaran sebagai alat penilaiann kinerja (*performance measurement tool*), alat untuk menilai kinerja

efisiensi dan pelaksanaan anggaran organisasi; 7) anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*) membuat target dan tujuan sesuai dengan kemampuan untuk memotivasi sehingga bekerja dengan ekonomis, efektif dan efisien.

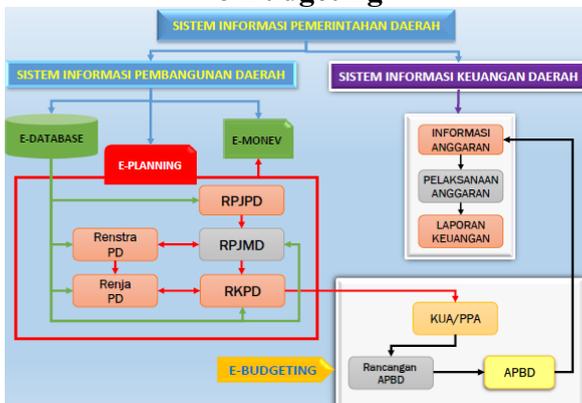
UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memuat 2 (dua) dasar pertimbangan. Pertama, untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kedua, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Hubungan *budgeting policy* pada level pemerintahan daerah, ada lima hal pokok yang harus diperhatikan, *pertama*, perlu adanya reformasi manajemen publik untuk mewujudkan *good governance* yang bercirikan antara lain: bersih, produktif, efisien, tanggap, responsif, terbuka atau transparan, akuntabel; *kedua* melakukan upaya pemberantasan korupsi dimulai dari diri sendiri dan lingkungan tempat kerja masing-masing, menghilangkan niat dan kesempatan untuk melakukan korupsi disertai peningkatan kesejahteraan bagi aparatur Negara; *ketiga* memberikan pelayanan publik yang konkrit, aplikatif, cepat, tepat, mudah, murah, makin baik, terus menerus meningkat dan tidak diskriminatif kearah peningkatan kualitas pelayanan public; *keempat* membuka ruang yang seluas-luasnya untuk menumbuh-kembangkan dan memupuk terciptanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan tatanan pemerintahan ; *kelima* keterbukaan akses informasi (transparansi) penyelenggaraan tatanan pemerintahan sehingga mekanisme check and balance dalam dan antara institusi governance akan berjalan sebagai upaya

mengeliminir terjadinya tindakan distortif dan korup.

Menurut [10] penggunaan teknologi informasi (TI) dalam pemerintahan (atau e-government) telah berkembang selama beberapa tahun terakhir sebagai sarana untuk membuat interaksi antara pemerintah dan warga negara (G2C), pemerintah dan bisnis (G2B), dan hubungan antar-lembaga (G2G) sehingga lebih efektif, demokratis dan transparan. Dampak semua interaksi ini beberapa tahun terakhir: di satu sisi pemerintah di seluruh dunia telah terlibat dalam gerakan untuk membuka data dengan lisensi terbuka dan format yang lebih mudah digunakan kembali; di sisi lain teknologi berkontribusi pada produksi jumlah data yang berpotensi membantu kita lebih memahami masalah sosial yang kompleks serta meningkatkan hubungan pemerintah dengan warga negara, organisasi swasta, LSM dan pemerintah lain.

**Gambar 2. Arus e-Planning dan e-Budgeting**



Sumber: UU No 3 Tahun 2014 Pasal 274, Pasal 391, Pasal 392, dan Pasal 393.

Pemerintah Kota Surabaya sebagai pilot project di Indonesia dalam hal e-Government menjabarkan e-budgeting sistem informasi yang digunakan dalam penyusunan anggaran sehingga efisien dan efektif. Sistem e-budgeting diharapkan dapat mempersingkat waktu proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara online yang dapat di akses dimana saja. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat

memantau poses dalam penyusunan anggaran. Prosedur dalam e-budgeting dapat mengantisipasi potensi adanya *mark-up* anggaran dengan adanya sistem saling mengawasi [11].

**Pelaksanaan e-Budgeting di Pemerintah Kota Batu**

Kota Batu dalam pelaksanaan e-Government telah memiliki beberapa sistem informasi yaitu: (1) E-Musrenbang sistem untuk menampung usulan perbaikan, pengadaan mulai dari RW, Kelurahan, Kecamatan, SKPD hingga BAPPEDA Kota Batu; (2) E-Planning sistem untuk menampung pengajuan yang ditampung dalam E-Musren; (3) SIKOMAR sistem untuk menampung seluruh Data Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Biaya Umum (SBU) secara periodikal serta memudahkan dalam perencanaan Rancangan Anggaran Belanja; (4) E-Budgeting sistem informasi untuk proses penyusunan APBD, revisi dan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) Pemerintah Kota Batu; (5) E-Procurement, sistem untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; (6) SMEP/ Monev system digunakan untuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah; (7) SIMAKOBA, yaitu sistem manajemen terhadap segala aset yang dimiliki Kota Batu; dan (8) SIMDA Keuangan, yaitu sistem pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang telah dimiliki Pemerintah Kota Batu ini merupakan penerapan e-government, dengan jenis Government-to-Government (G2G) yang berfungsi untuk membantu pengelolaan internal organisasi Pemkot Batu. Pemerintah Kota Batu (Pemkot Batu) memiliki beberapa sistem informasi yang belum terkoneksi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dan tata kelola daerah.

Sistem E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis

web untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Revisi, dan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) Pemerintah Kota. Tujuan E-Budgeting Memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD, revisi dan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) di Pemerintah Kota Batu. Ruang Lingkup

1. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Belanja (ASB).
  2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sehingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
  3. Revisi DPA SKPD
  4. Penyusunan Perubahan APBD (PAK).
- Langkah-langkah penyusunan sistem e-budgeting, antara lain:

1. RPJM dalam kurun 5 (lima) tahun, maka pada saat akan melakukan penyusunan APBD, terlebih dahulu disusun RKPDP yang merupakan penjabaran dari RPJM dengan menggunakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah;
2. Bappeko melakukan koordinasi rencana pembangunan dengan kelurahan, kecamatan dan kota melalui musrenbang, yang dilaksanakan pada awal tahun;
3. Berdasarkan RKPDP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Walikota dibantu TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah menyusun KUA;
4. Rancangan KUA disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan dimintakan persetujuan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD;
5. Setelah rancangan KUA disetujui, selanjutnya disusun PPAS, untuk dibahas bersama TAPD dengan

panitia anggaran DPRD dalam rapat Badan Anggaran DPRD;

6. Rancangan PPAS yang telah disepakati selanjutnya menjadi PPA;
7. KUA dan PPA yang telah disepakati, dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara DPRD dan Walikota;
8. Berdasarkan Nota Kesepakatan terkait KUA dan PPA, Walikota mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD;
9. Penyusunan SSH, HSPK, ASB.
10. Penyusunan RKA / DPA
11. Revisi / Pergeseran APBD
12. Penyusunan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK)

**Tabel 1. Beberapa Pengelola e-Budgeting**

<b>Nama / Jabatan</b>	<b>Tugas Pokok /Fungsi</b>
Bpk Saiful (Operator e-budgeting OPD-A)	Entry Rencana Anggaran Perangkat Daerah
Ibu Aminah (Kasi Sungram OPD-B)	Kordinator pelaksanaan e-budgeting di OPD
Ibu Susi (Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD-C)	Kordinator pelaksanaan e-budgeting di OPD, koordinasi dengan data SIMDA
Bapak Ahmad (Kepala OPD-D)	Pengambil keputusan dan penanggungjawab pelaksanaan keuangan (anggaran) OPD.
Bapak Nur (Kepala Seksi Bappelitbangda)	Pelaksanaan entry anggaran di semua OPD ke dalam e-budgeting (system, koordinasi).
Bapak Syamsul (Kepala Bidang Bappelitbangda)	Monitoring dan penanggungjawab terlaksananya sistem

Berikut hasil beberapa wawancara (nama tersebut adalah samaran) antara lain dengan operator e-Budgeting OPD A, mengenai

permasalahan dalam pelaksanaan e-budgeting:

“bahwa pelaksanaan sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 untuk kendala adalah waktu untuk entry data sangat terbatas sehingga khawatir akan ketepatan angka dan kode rekening yang dimasukkan”.

Menurut kepala seksi penyusunan program OPD B tentang pelaksanaan e-budgeting,

“pelaksanaan e-budgeting sangat bergantung kepada kerjasama di masing-masing OPD dalam proses pengajuan anggaran yang diketuai oleh masing masing PPTK di OPD juga butuh komitmen kepala OPD untuk tidak mengajukan perubahan yang mendadak dan tidak ada RAB juga tanpa melewati PPTK OPD tersebut”.

PPK OPD-C bercerita tentang berlakunya e-budgeting dan pelaksanaan keuangan daerah khususnya di OPD, bahwa pada tahun 2018 awal berlakunya pelaksanaan belum terintegrasi dengan SIMDA yang menyulitkan dalam pengecekan hasil akhir, sehingga harapan bahwa entry e-budgeting bisa langsung menjadi angka di SIMDA belum terlaksana. Wawancara dengan Kepala OPD-D tentang hasil pelaksanaan e-budgeting menunjukkan:

“e-budgeting diharapkan dapat membantu OPD dalam pengisian anggaran baik rencana anggaran atau perubahan anggaran tahun berjalan”.

Sedangkan wawancara dengan Kepala Seksi Bappelitbangda yang berhubungan dengan e-budgeting mengungkap masalah:

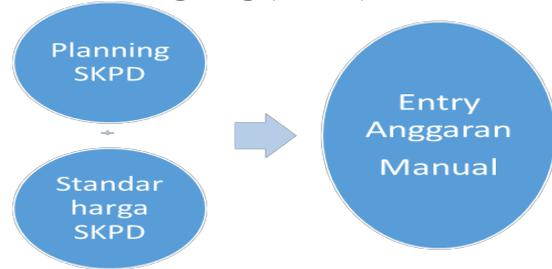
“banyak masalah dari OPD antara lain ketepatan waktu entry data, adanya data yang tidak sama antara di system e-budgeting, ajuan hardcopy ataupun softcopy”.

Wawancara dengan Kepala Bidang Bappelitbangda tentang pelaksanaan e-budgeting, bahwa sangat diharapkan kerjasama OPD dalam entry e-budgeting tepat waktu walaupun untuk waktu memang diberi tenggang waktu terbatas; mengharapakan kepala Kepala OPD untuk

juga terlibat dalam e-Budgeting di OPD masing-masing.

Berikut skema sebelum berlakunya e-budgeting (2016) dan setelah berlakunya e-budgeting (2017-2019) di Pemkot Batu.

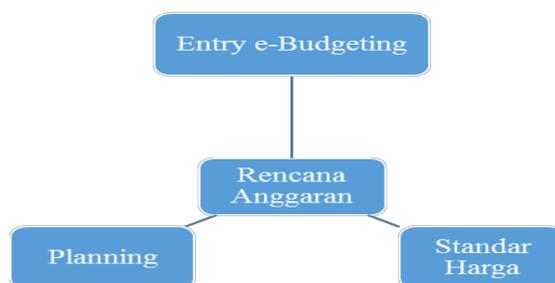
**Gambar 3 Sebelum berlakunya e-Budgeting (SKPD)**



Sumber: wawancara

Sebelum berlakunya pelaksanaan e-budgeting entry anggaran dilakukan secara manual oleh OPD lalu diajukan kepada Bappeda, yang sebelumnya ada ajuan perencanaan (*planning*) untuk lima tahun dan ajuan standar harga OPD. Cara manual ini memang banyak memuat masalah, hasil wawancara dengan Kasi Peyusunan dan Program OPD-B bahwa “...bisa terjadi kesalahan entry data karena kurang tepat dan tidak sinkron dengan kode rekening yang tersedia di OPD tersebut, dan dapat dirubah sewaktu-waktu oleh OPD dengan cara ajuan kembali kepada Bappeda”.

**Gambar 4. Setelah Berlakunya e-Budgeting (SKPD)**



Gambar 4 menunjukkan bahwa setelah berlakunya e-Budgeting terjadi perbaikan

perencanaan dan penetapan standar harga. Wawancara menunjukkan:

“bahwa terjadi kecepatan entry data dan dapat segera di periksa oleh Bappelitbangda jika ada kesalahan entry dan kekurangan kode rekening pada ajuan OPD”.

Hasil wawancara dengan Kasi Bappelitbangda menunjukkan banyak sekali perubahan dan pengaruh e-budgeting pada keuangan daerah, sehingga berdampak terhadap tata pemerintahan. *E-budgeting* sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan pada era teknologi saat ini khususnya di sector public. Berdasarkan data yang dilakukan *Transparency International* (TI) Indonesia berada pada posisi ke 114, pemerintah memiliki kekuatan terhadap warga, monopoli dan tingkat diskresi yang besar terhadap warganya bisa menimbulkan korupsi di sector public. E-budgeting dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang dan korupsi karena teknologi akan menjadikan proses menjadi transparan, mudah dan diharapkan tanpa intervensi [1]. Hasil dari *e-budgeting* pemerintah Kota Batu pada tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih banyak terdapat kekurangan dalam hal teknologi, penerapan dalam system dan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan, juga koordinasi yang belum dilakukan dengan baik antara penyelenggara system tersebut. Pada tahun 2018 e-budgeting melakukan koreksi atau perbaikan pelaksanaan tahun sebelumnya dan sudah dilakukan dengan baik namun beberapa kekurangan masih terjadi terutama dalam system yang belum terkoordinasi atau terintegrasi dengan system lainnya seperti SIMDA dan system lainnya. Pada tahun 2019 e-budgeting diusahakan terlaksana sinkron dengan system lainnya seperti SIMDA. Pemkot Batu untuk mewujudkan APBD yang efektif, efisien dan proporsional pada tahun 2018 menjalankan 396 program dan 1.511 kegiatan, lalu pada tahun 2019 hanya ada 154 program dan 771 kegiatan.

### **Akuntabilitas**

Sistem akuntansi dalam e-budgeting menjembatani pejabat pemerintah dalam menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menyusun dan mengambil keputusan khususnya anggaran yang setiap prosedur dalam sistem akuntansi juga harus mematuhi peraturan pemerintah, sehingga dibutuhkan sistem akuntansi yang fleksibel, memungkinkan pejabat memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan [12]. Sistem e-budgeting juga mendukung dalam hal akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, penelitian [5] menggunakan jeda waktu selama tiga tahun, implementasi e-budgeting tahun 2016-2018 dihubungkan (diregresikan) dengan data transparansi keuangan daerah tahun 2018, membuktikan implementasi e-budgeting berpengaruh positif.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan pada kemampuan menjawab (*an-swerability*) dan konsekuensi (*consequences*) atas penyelenggaraan pemerintahan sebagai sebuah respon pemerintah secara periodik atas setiap pertanyaan-pertanyaan (keluhan) publik dan konsekuensi yang harus diterima oleh aparatur publik ke depan sebagai tindakan tanggung-gugat peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi anggaran dan pertanggungjawaban sendiri tidak memecahkan tantangan demokrasi dan perkembangan yang paling mendesak. Sebaliknya, upaya untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas anggaran harus dipertimbangkan bersamaan dengan beberapa bidang lain yang dipertimbangkan dalam buku ini. Audit sosial menyoroti hubungan antara transparansi akuntabilitas yang terkait dengan anggaran dan pemberian layanan. Menempatkan transparansi anggaran dalam konteks inisiatif yang lebih luas untuk mengamankan kebebasan informasi, beberapa masalah juga relevan dengan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas [14].

Sistem kinerja keuangan daerah berkembang dari waktu ke waktu dan

menciptakan perbedaan tantangan di setiap tahap. Pada tahap awal, hanya mengembangkan yang relevan sebagai tantangan utama, namun saat sistem kinerja bergerak maju, tantangan lainnya yang menjadi lebih penting: perubahan perilaku, bagaimana membuat, menggunakan serta mengambil keputusan, dan bagaimana memantau kinerja sistem itu sendiri. Pendekatan reformasi keuangan daerah perlu disesuaikan dengan Negara juga pemerintah daerah yang melaksanakan metode berdasarkan pengalaman reformasi sebelumnya atau sebagai reaksi terhadap perubahan dalam struktur politik atau administrasi yang lebih luas, sehingga tercapai akuntabilitas.

#### 4. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai *good governance*, ada tiga pilar guna menuju kinerja pemerintahan yang diharapkan: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi haruslah diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk *revitalisasi*, yaitu penginjeksian nilai-nilai *good governance* dalam praktek-praktek penyelenggaraan urusan (manajemen) publik dengan landasan legal formal nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-government juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang menghambat keberhasilan e-government, seperti: (1) kurangnya teknologi atau staf web, (2) kurangnya sumber daya keuangan, (3) kurangnya informasi tentang e-aplikasi pemerintah, dan (4) kurangnya dukungan dari pejabat terpilih. Penelitian juga mengidentifikasi hambatan terkait dengan buruknya perencanaan dan pelaksanaan adopsi *e-government* setempat [13].

Budgeting harus diikuti dengan empat unsur, antara lain: *rencana* (meliputi seluruh kegiatan, dinyatakan dalam unit moneter, serta untuk jangka waktu mendatang). Rencana berguna sebagai tujuan organisasi dalam budgeting; *kegiatan* budgeting juga

harus meliputi seluruh kegiatan lembaga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembelanjaan, administrasi, dan kepegawaian; budgeting harus dinyatakan dalam *unit moneter* yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan lembaga yang beraneka ragam dan terakhir, budgeting harus berisi *taksiran-taksiran* tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Beberapa keuntungan melakukan budgeting, 1) menjadi pedoman kerja bahwa budgeting akan membantu manajemen untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan semula, yakni tujuan jangka panjang, target akan tetap tercapai dengan baik karena setiap orang tidak memiliki tujuan sendiri-sendiri. 2) review perencanaan organisasi sangat mudah melalui budgeting; 3) setiap bagian yang tidak membuat anggaran sesuai visi misi terlihat dengan jelas sehingga manajemen dapat melakukan sesuatu terhadap organisasi tersebut, baik itu langkah perbaikan diri atau mungkin harus melakukan efisiensi; 4) membantu evaluasi kerja dari tahun lalu dalam membantu membangun di dalam sebuah periode budgeting; 5) bisa menganggarkan insentif ketika mampu mencapai tujuan besar organisasi dan visi-misi kota, sehingga sekaligus memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri lebih baik lagi di kemudian hari, membantu koordinasi kerja, bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan. Saling menunjang dan bekerjasama adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi dan tidak diragukan lagi dicapai oleh organisasi bila menerapkan budgeting dalam proses kegiatan mereka.

Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah dalam hal e-budgeting dari awal rancangan, pelaksanaan telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan untuk perbaikan, namun sangat dibutuhkan: sumber daya manusia yang menangani e-budgeting; dukungan dari pejabat dan koordinasi dari

semua pihak. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dilaksanakan pada beberapa tahun pengamatan dan di beberapa pemerintah daerah di Indonesia. E-budgeting sangat membantu jika dilaksanakan dengan kemauan dan keinginan seluruh pihak terkait untuk berjalannya good governance sehingga akuntabilitas terutama dalam keuangan daerah pemerintah kota dapat dipertanggungjawabkan dengan baik

#### Daftar Rujukan

- [1] Hardjaloka L. Studi Penerapan E-Government di Indonesia Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. *J RechtsVinding-Media Pembina Huk Nas* 2014;3:18.
- [2] Manoharan AP, Ingrams A. Conceptualizing E-Government From Local Government Perspectives. *State Local Gov Rev* 2018;1–11. doi:10.1177/0160323X18763964.
- [3] Rahman RAT, Irianto G, Rosidi. Evaluation of E-Budgeting Implementation in Provincial Government of DKI Jakarta Using CIPP Model Approach. *J Account Invest* 2019;20:94–114. doi:10.18196/jai.2001110.
- [4] Qudrat K, Elahi I. UNDP on good governance. *Int J Soc Econ* 2009;36:1167–80. doi:https://doi.org/10.1108/03068290910996981.
- [5] Nasution DAD, Ramadhan PR. Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akunt* 2019;28:669–93. doi:10.24843/EJA.2019.v28.i01.p26.
- [6] Creswell JW. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. vol. 2nd ed. 2007. doi:10.1016/j.aenj.2008.02.005.
- [7] Sugiyono. *Metode Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia; 2017.
- [8] Khusaini M. *Keuangan Daerah*. November. Malang: UB Press; 2018.
- [9] Nurkholis, Khusaini M. *Penganggaran Sektor Publik*. Januari. Malang: UB Press; 2019.
- [10] Mellouli S, Luna-reyes LF, Zhang J. Smart Government , Citizen Participation and Open Data. *Inf Policy* 2014;19:1–4. doi:10.3233/IP-140334.
- [11] Surabaya K. *Prosedur e-Budgeting*. Februari 2. Surabaya: BP.Sby; 2014.
- [12] Tri Jatmiko, Wahyu Prabowo Leung P, Guthrie J. *Reforms In Public Sector Accounting And Budgeting In Indonesia (2003-2015): Confusions In Implementation*. *J Public Budgeting, Account Financ Manag* 2017;29:104–37. doi:https://doi.org/10.1108/JPBAFM-29-01-2017-B005.
- [13] Norris DF, Reddick CG. Local E-Government in the United States: Transformation or Incremental Change? *Public Administration Rev* 2012;73:165–75. doi:10.1111/j.1540-6210.2012.02647.x.Local.
- [14] Carlitz R. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process : An Assessment of Recent Initiatives. *Dev Policy Rev* 2013;31:49–67. doi:https://doi.org/10.1111/dpr.12019.